

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Syariah terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pengelolaan Dana Publik di Pemerintah Daerah

¹ Mahdanisa Anggita Hasibuan, ² Listiarini,

^{1,2}, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

email: ¹mahdanisaanggitaahasibuan@unsri.ac.id, ²listiarini@unsri.ac.id,

Keywords:

Transparency, Sharia Accountability, Public Trust, Public Fund Management, Palembang Regional Government.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of transparency and sharia accountability on public trust in the management of public funds at the Palembang Regional Government. The research is motivated by the importance of implementing principles of good governance based on Islamic values to enhance public legitimacy and trust in public financial management. This study employs a quantitative approach, with data collected through an online questionnaire (Google Form) distributed for one month to residents of Palembang City. The data were then processed using Smart PLS to test validity, reliability, and the relationships between variables through outer model and inner model analyses. The results indicate that both transparency and sharia accountability have a positive and significant influence on public trust. Transparency shows a dominant effect, confirming that openness of information and public access to financial data are key factors in building public trust. Meanwhile, sharia accountability also contributes positively through its moral and spiritual dimensions, which reinforce honesty, integrity, and responsibility in managing public funds. Overall, the findings confirm that the consistent implementation of transparency and sharia accountability strengthens public trust and supports the creation of ethical, open, and just public fund management practices aligned with Islamic principles.

Kata Kunci:

Transparansi, Akuntabilitas Syariah, Kepercayaan Masyarakat, Pengelolaan Dana Publik, Pemerintah Daerah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas syariah terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik pada Pemerintah Daerah Palembang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berbasis nilai-nilai Islam, guna meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner daring (Google Form) selama satu bulan kepada masyarakat Kota Palembang. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan aplikasi Smart PLS untuk menguji validitas, reliabilitas, serta hubungan antarvariabel melalui analisis outer model dan inner model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik transparansi maupun akuntabilitas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Variabel transparansi memiliki pengaruh dominan, yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan akses publik terhadap data keuangan pemerintah merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas syariah juga berkontribusi positif melalui dimensi moral dan spiritual yang memperkuat kejujuran serta integritas dalam pengelolaan dana publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas syariah secara konsisten mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong terciptanya pengelolaan dana publik yang beretika, terbuka, dan berkeadilan sesuai prinsip Islam.

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks pemerintahan daerah, kedua prinsip ini menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan mampu mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan kepada publik. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola dana publik secara efisien, efektif, dan berintegritas tinggi, mengingat dana tersebut bersumber dari masyarakat melalui berbagai mekanisme pajak, retribusi, dan transfer pemerintah pusat (Liu, 2022). Di dalam praktiknya, masih banyak ditemukan persoalan yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik di daerah, termasuk di Kota Palembang.

Fenomena menurunnya kepercayaan publik dapat dilihat dari berbagai laporan audit, pemberitaan media, hingga hasil survei persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Pemerintah Kota Palembang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya, masyarakat masih sering mempertanyakan sejauh mana transparansi informasi keuangan benar-benar mudah diakses dan dipahami. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pencapaian administratif dengan persepsi publik terhadap akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah daerah (Ali, 2024). Dalam konteks Islam, kondisi ini menjadi lebih penting karena pengelolaan dana publik harus berlandaskan prinsip *amanah*, *keadilan*, dan *maslahah*, yang sejalan dengan konsep akuntabilitas syariah.

Akuntabilitas syariah tidak hanya menekankan pertanggungjawaban manusia kepada sesama, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai sumber nilai dan moralitas tertinggi. Dalam prinsip syariah, setiap pemegang amanah publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan, kebijakan, dan penggunaan dana publik dilakukan sesuai dengan nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas syariah di lingkungan pemerintah daerah tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga spiritual dan moral (Wu, 2020). Ketika aparatur pemerintah menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam setiap tindakan, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat secara alami karena mereka melihat integritas dan ketulusan dalam pelayanan publik.

Di sisi lain, transparansi memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Transparansi dalam konteks pemerintahan daerah mencakup keterbukaan informasi anggaran, publikasi laporan keuangan, serta komunikasi aktif antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana publik (Lu, 2021). Pemerintah Kota Palembang telah berupaya meningkatkan transparansi melalui berbagai kanal digital, seperti portal informasi keuangan daerah dan layanan pengaduan publik. Namun, efektivitas upaya tersebut masih perlu dikaji, terutama dalam hal sejauh mana masyarakat merasa informasi tersebut relevan, mudah diakses, dan benar-benar meningkatkan pemahaman mereka tentang penggunaan dana publik.

Masyarakat Kota Palembang, sebagai bagian dari komunitas yang religius dan memiliki nilai keislaman yang kuat, memiliki harapan besar terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola pemerintahan (Rafew, 2021). Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya integritas dan nilai moral dalam sektor publik. Ketika pemerintah daerah mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas berdasarkan prinsip syariah, kepercayaan masyarakat tidak hanya akan terbentuk pada aspek rasional, tetapi juga emosional dan spiritual. Kepercayaan ini sangat penting karena menjadi modal sosial utama dalam mendukung keberhasilan program-program pembangunan daerah.

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih adanya kesenjangan antara idealitas prinsip tata kelola syariah dengan implementasi nyata di lapangan. Dalam banyak kasus, transparansi masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana publik. Begitu pula akuntabilitas seringkali hanya berfokus pada pelaporan keuangan tanpa memperhatikan aspek moral dan tanggung jawab sosial (Tort-Donada, 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah transparansi dan akuntabilitas syariah benar-benar berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik di Pemerintah Daerah Palembang?

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai stabilitas sosial dan efektivitas pemerintahan. Ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, mereka akan lebih kooperatif dalam membayar pajak, mengikuti kebijakan publik, serta mendukung program pembangunan. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan masyarakat akan menimbulkan

resistensi sosial, meningkatnya sikap apatis, serta melemahnya legitimasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas syariah, menjadi penting untuk perbaikan kebijakan publik ke depan (Michaelowa, 2020).

Dalam perspektif teoritis, hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik telah banyak dibahas dalam literatur tata kelola pemerintahan. Teori *agency* menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar pihak yang diberi wewenang (*agent*) bertindak sesuai dengan kepentingan publik (*principal*) (Mavrotas, 2021) (Parker, 2023). Dalam konteks pemerintahan berbasis nilai Islam, teori ini perlu dilengkapi dengan dimensi spiritual yang menekankan tanggung jawab vertikal kepada Allah SWT. Dengan demikian, konsep akuntabilitas syariah menjadi relevan untuk menjelaskan hubungan moral antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dana publik.

Secara empiris, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik (Greer, 2020) (Michaelowa, 2020). Sementara itu, akuntabilitas syariah terbukti mampu memperkuat persepsi masyarakat terhadap keadilan dan integritas pemerintah (Amalia & Widiastuti, 2020). Namun, sebagian penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, di mana tingkat kepercayaan masyarakat tidak selalu meningkat meskipun transparansi dan akuntabilitas secara administratif sudah diterapkan (Jas, Maarif, Syaukat, & Beik, 2023). Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya ruang penelitian lebih lanjut, khususnya dalam konteks daerah dengan karakteristik sosial-keagamaan seperti Palembang (Furqan Uki, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana transparansi dan akuntabilitas syariah memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik di Pemerintah Daerah Palembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep tata kelola keuangan publik berbasis syariah, serta memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, diharapkan partisipasi publik dalam mendukung program pembangunan daerah juga akan semakin kuat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara konseptual, transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan, penggunaan anggaran, dan hasil kinerja kepada masyarakat. Transparansi bertujuan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses (Kurniawan, 2019). Dalam konteks pengelolaan dana publik, transparansi mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah membuka ruang bagi publik untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Transparansi tidak hanya terbatas pada penyediaan data, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. Pemerintah yang transparan cenderung mendapat legitimasi lebih tinggi karena masyarakat dapat menilai kinerja secara objektif (Pradesyah, Yuslem, & Batubara, 2021) (Upadhyay, 2022). Dalam perspektif Islam, transparansi sejalan dengan nilai *shidq* (kejujuran) dan *tabligh* (penyampaian informasi yang benar), sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan amanah publik. Prinsip ini menuntut pemerintah untuk tidak menutup-nutupi informasi yang menjadi hak masyarakat.

Dengan meningkatnya transparansi, masyarakat akan merasa dilibatkan dan memiliki kendali dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik. Hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya, mengurangi kecurigaan terhadap penyalahgunaan dana, serta memperkuat integritas lembaga pemerintah. Oleh karena itu, transparansi menjadi variabel penting yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik di pemerintah daerah.

2. Akuntabilitas Syariah

Akuntabilitas syariah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Dalam perspektif Islam,

akuntabilitas mencakup tanggung jawab manusia kepada sesama dan kepada Allah SWT sebagai sumber segala amanah. Akuntabilitas syariah berlandaskan konsep *khalifah* (pemimpin) dan *amanah* (kepercayaan), di mana setiap pengelola sumber daya publik wajib bertanggung jawab atas penggunaan dan dampaknya terhadap masyarakat. Akuntabilitas syariah menekankan integrasi antara kepatuhan hukum dan nilai etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umat (Ismail & Pradesyah, 2020) (Zhou, 2020).

Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas syariah tercermin dalam komitmen aparatur pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik secara transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini tidak hanya diwujudkan melalui laporan keuangan yang sesuai standar, tetapi juga melalui perilaku etis yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Akuntabilitas syariah menuntut adanya kesadaran spiritual bahwa setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT (*hisab*). Oleh sebab itu, aparatur publik yang memiliki akuntabilitas syariah tinggi akan menghindari korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang (Jas et al., 2023) (Hlel, 2020).

Implementasi akuntabilitas syariah dalam lembaga pemerintahan dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat (Islam, 2022). Masyarakat akan menilai bahwa pemerintah bertindak dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan sesuai nilai moral Islam. Dengan demikian, akuntabilitas syariah menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengelolaan dana publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

3. Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat merupakan persepsi publik terhadap integritas, kejujuran, dan kompetensi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pengelolaan dana publik, kepercayaan masyarakat mencerminkan sejauh mana masyarakat yakin bahwa pemerintah mengelola dana dengan jujur, efisien, dan sesuai peraturan. Kepercayaan terbentuk dari tiga dimensi utama, yaitu kemampuan (*ability*), kebaikan hati (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Ketika pemerintah menunjukkan kinerja yang transparan dan akuntabel, maka masyarakat akan menilai bahwa pemerintah layak dipercaya (Liu, 2022).

Dalam perspektif Islam, kepercayaan masyarakat berakar pada konsep *amanah* dan *sidq*. Pemerintah yang menjaga amanah publik berarti menunaikan tanggung jawab dengan benar tanpa menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Kepercayaan juga dapat tumbuh melalui hubungan komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Ketika publik memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dana, persepsi keadilan dan kejujuran akan meningkat, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah pun menguat (Banerjee, 2020) (Ahmad, 2020).

Kepercayaan masyarakat tidak hanya berdampak pada legitimasi pemerintah, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintah yang dipercaya akan lebih mudah memperoleh dukungan masyarakat, baik dalam bentuk kepatuhan terhadap regulasi maupun partisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menimbulkan sikap skeptis dan apatis terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang membentuk kepercayaan masyarakat menjadi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

4. Pengelolaan Dana Publik

Pengelolaan dana publik merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah pusat untuk kepentingan publik. Pengelolaan dana publik yang baik harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks pemerintah daerah, dana publik digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan penguatan ekonomi daerah (Garber, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan dana publik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan penyalahgunaan atau ketidakpercayaan masyarakat.

Dari perspektif Islam, dana publik merupakan *amanah* yang harus dikelola untuk *maslahah* atau kemaslahatan bersama. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga harta umat agar tidak disalahgunakan, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan dana publik bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Aparatur pemerintah wajib memastikan bahwa setiap rupiah dana publik digunakan secara adil, transparan, dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana publik sering menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan potensi penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik berjalan sesuai nilai-nilai keislaman. Ketika masyarakat melihat pengelolaan dana publik dilakukan secara jujur dan terbuka, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi dan efektivitas pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengukuran objektif terhadap fenomena sosial melalui analisis numerik dan pengolahan data statistik. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas syariah terhadap kepercayaan masyarakat pada pengelolaan dana publik di Pemerintah Daerah Palembang secara empiris. Dengan metode ini, peneliti dapat menguji hubungan antar variabel secara terukur dan memperoleh hasil yang dapat digeneralisasikan.

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Kuesioner ini disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu transparansi, akuntabilitas syariah, kepercayaan masyarakat, dan pengelolaan dana publik. Instrumen kuesioner menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5, di mana angka 1 menunjukkan tingkat ketidaksetujuan terendah dan angka 5 menunjukkan tingkat persetujuan tertinggi. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Palembang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap kebijakan serta pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah.

Proses penyebaran kuesioner dilakukan selama satu bulan, dengan tujuan untuk memperoleh jumlah responden yang representatif dan mencerminkan persepsi masyarakat secara luas. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah tabulasi data, yaitu proses pengelompokan, pemeriksaan, dan pengkodean jawaban responden agar siap diolah secara statistik. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi syarat kelayakan analisis, termasuk pengecekan kelengkapan dan konsistensi jawaban.

Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi statistik Smart Partial Least Squares (Smart PLS). Pemilihan Smart PLS didasarkan pada kemampuannya dalam menguji hubungan antar variabel laten secara simultan dan menilai validitas serta reliabilitas instrumen penelitian. Analisis dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu *outer model* dan *inner model*. Analisis *outer model* digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk, sedangkan analisis *inner model* digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel dan signifikansi hubungan yang terbentuk dalam model penelitian.

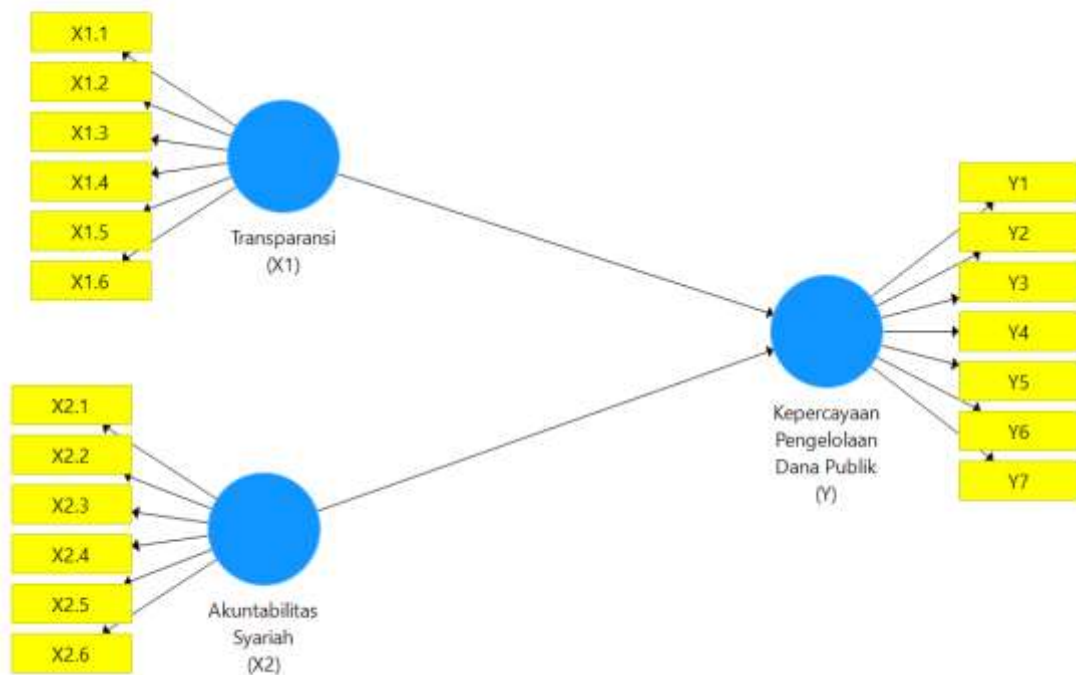
Hasil dari pengolahan data dengan Smart PLS akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui pendekatan kuantitatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan bukti empiris yang kuat mengenai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas syariah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pengelolaan dana publik di Pemerintah Daerah Palembang.

- 1 H0 Tidak ada pengaruh Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Dana Publik Di Pemerintahan Palembang
Ha Ada pengaruh Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Dana Publik Di Pemerintahan Palembang
- 2 H0 Tidak ada pengaruh Akuntabilitas Syariah Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Dana Publik Di Pemerintahan Palembang
Ha Ada pengaruh Akuntabilitas Syariah Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Dana Publik Di Pemerintahan Palembang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Model penelitian ini terdiri dari dua variabel independen, yaitu Transparansi (X1) dan Akuntabilitas Syariah (X2), serta satu variabel dependen yaitu Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Publik (Y). Hubungan antarvariabel ini diilustrasikan dalam model struktural yang menunjukkan arah pengaruh langsung dari X1 dan X2 terhadap Y. Adapun kerangka yang dibangun dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar.1. Kerangka Penelitian

Gambar di atas menunjukkan variabel memiliki beberapa pernyataan yang diajukan dalam penyebaran kuisisioner, dimana para variabel Transparansi (X1) memiliki 6 pernyataan yang digunakan dalam penelitian, kemudian variabel Akuntabilitas Syariah (X2) memiliki 6 pernyataan, dan yang terakhir variabel terikan Kepercayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Dana Publik (Y) memiliki 7 pernyataan yang diajukan dalam penelitian.

Kemudian dilakukan pengujian outer loading, guna untuk melihat pernyataan yang dapat digunakan atau untuk melakukan uji validitas pada masing-masing pernyataan yang diajukan dalam penelitian. Adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut :

Tabel.1. Uji Validitas (Outer Loading)

	Akuntabilitas Syariah_(X2)	Kepercayaan Pengelolaan Dana Publik_(Y)	Transparansi_(X1)
X1.3			0,814
X1.4			0,756
X1.5			0,865
X2.1	0,938		
X2.2	0,868		
X2.5	0,752		

Y3		0,762	
Y4		0,875	
Y5		0,848	
Y7		0,782	

Sumber : Hasil Olahan Data

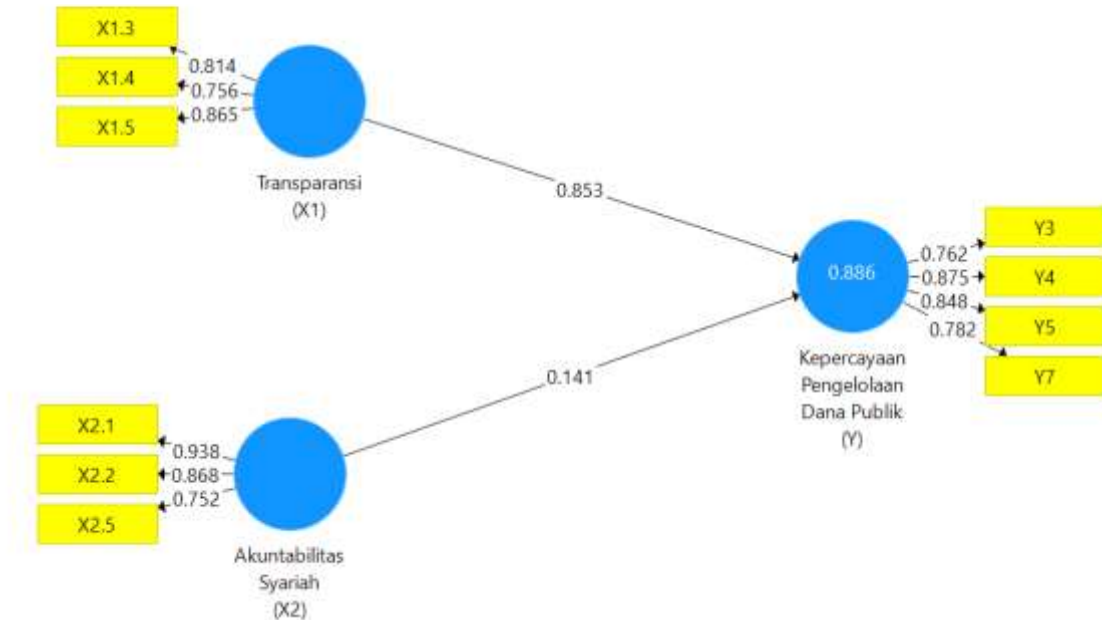
Langkah pertama ini dilakukan untuk menguji validitas konvergen melalui nilai *outer loading* pada setiap indikator. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai *loading factor* di atas 0,7, yang berarti seluruh item kuesioner mampu menjelaskan konstraknya secara baik.

Pada variabel Transparansi (X1), indikator X1.3, X1.4, dan X1.5 memiliki nilai *loading factor* masing-masing sebesar 0,814; 0,756; dan 0,865. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa aspek keterbukaan informasi, kejelasan laporan keuangan, serta kemudahan akses terhadap data publik merupakan faktor penting dalam membentuk persepsi transparansi pemerintah daerah.

Sementara pada variabel Akuntabilitas Syariah (X2), indikator X2.1, X2.2, dan X2.5 memiliki nilai *loading factor* 0,938; 0,868; dan 0,752. Ini menunjukkan bahwa dimensi tanggung jawab moral, integritas spiritual, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah sangat dominan dalam mencerminkan tingkat akuntabilitas syariah pemerintah.

Untuk variabel Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Publik (Y), indikator Y3, Y4, Y5, dan Y7 memiliki nilai masing-masing 0,762; 0,875; 0,848; dan 0,782. Artinya, kepercayaan masyarakat terutama terbentuk melalui persepsi terhadap kejujuran pemerintah, konsistensi kebijakan, transparansi anggaran, dan kemampuan pemerintah menjaga amanah publik.

Secara keseluruhan, hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap indikator telah memenuhi kriteria *convergent validity*, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid untuk mengukur konstruk yang diteliti. Hal ini tentunya dapat di validasi dengan gambar yang didapatkan dari pengolahan *outer loading* yang didapatkan. Adapun hasilnya sebagai berikut :



Gambar.1. Uji Outer Loading

Setelah memastikan validitas indikator, langkah berikutnya adalah menguji potensi multikolinearitas antarindikator melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. dimana syarat yang digunakan bahwa nilai $VIF < 5$ maka dinyatakan tidak ada masalah korelasi pada pernyataan yang diajukan, adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut :

Tabel.2. Variance Inflation Factor (VIF)

	VIF
X1.3	1,580
X1.4	1,332
X1.5	1,759
X2.1	3,695
X2.2	1,985
X2.5	2,330
Y3	1,519
Y4	2,675
Y5	2,053
Y7	2,011

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa seluruh nilai VIF berada di bawah ambang batas 5, dengan rentang antara 1,332 hingga 3,695. Nilai tersebut menandakan

tidak adanya korelasi tinggi antarindikator yang dapat mengganggu kestabilan model. Dengan kata lain, setiap indikator memiliki kontribusi unik dalam menjelaskan variabelnya masing-masing. Hal ini penting, karena multikolinearitas yang rendah menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel bersifat independen dan hasil estimasi model dapat diinterpretasikan secara lebih akurat.

Keterkaitan hasil ini dengan uji validitas menunjukkan bahwa indikator yang valid juga bersifat bebas satu sama lain, memperkuat keyakinan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mengukur aspek transparansi, akuntabilitas syariah, dan kepercayaan masyarakat secara tepat.

Tahapan selanjutnya adalah menguji reliabilitas dan validitas konstruk secara keseluruhan. Adapun hasil yang didapatkan dari pengujian yang dilakuakn sebagai berikut :

Tabel.3. Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas Syariah_(X2)	0,824	0,885	0,891	0,733
Kepercayaan Pengelolaan Dana Publik_(Y)	0,835	0,839	0,890	0,670
Transparansi_(X1)	0,741	0,746	0,853	0,661

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria yang disyaratkan. Nilai **Cronbach's Alpha** untuk masing-masing variabel adalah 0,741 (Transparansi), 0,824 (Akuntabilitas Syariah), dan 0,835 (Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Publik). Ketiga nilai ini berada di atas 0,7, yang menandakan bahwa setiap variabel memiliki konsistensi internal yang baik.

Selain itu, nilai **Composite Reliability (CR)** untuk masing-masing konstruk juga tinggi, yaitu 0,853 untuk Transparansi, 0,891 untuk Akuntabilitas Syariah, dan 0,890 untuk Kepercayaan Masyarakat. Nilai CR di atas 0,8 menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat keandalan yang sangat baik.

Sementara itu, nilai **Average Variance Extracted (AVE)** untuk masing-masing konstruk sebesar 0,661 (Transparansi), 0,733 (Akuntabilitas Syariah), dan 0,670 (Kepercayaan Masyarakat). Nilai AVE di atas 0,5 menandakan bahwa sebagian besar varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk laten yang diwakilinya. Keterkaitan hasil ini dengan uji sebelumnya menunjukkan bahwa setelah indikator dinyatakan valid dan bebas multikolinearitas, konstruk secara keseluruhan juga reliabel. Dengan

demikian, instrumen penelitian ini dinilai layak untuk digunakan dalam analisis hubungan antarvariabel.

Tahapan berikutnya adalah menguji hubungan antarvariabel laten menggunakan analisis *path coefficient*. Adapun hasil yang didapatkan pada pengujian ini sebagai berikut :

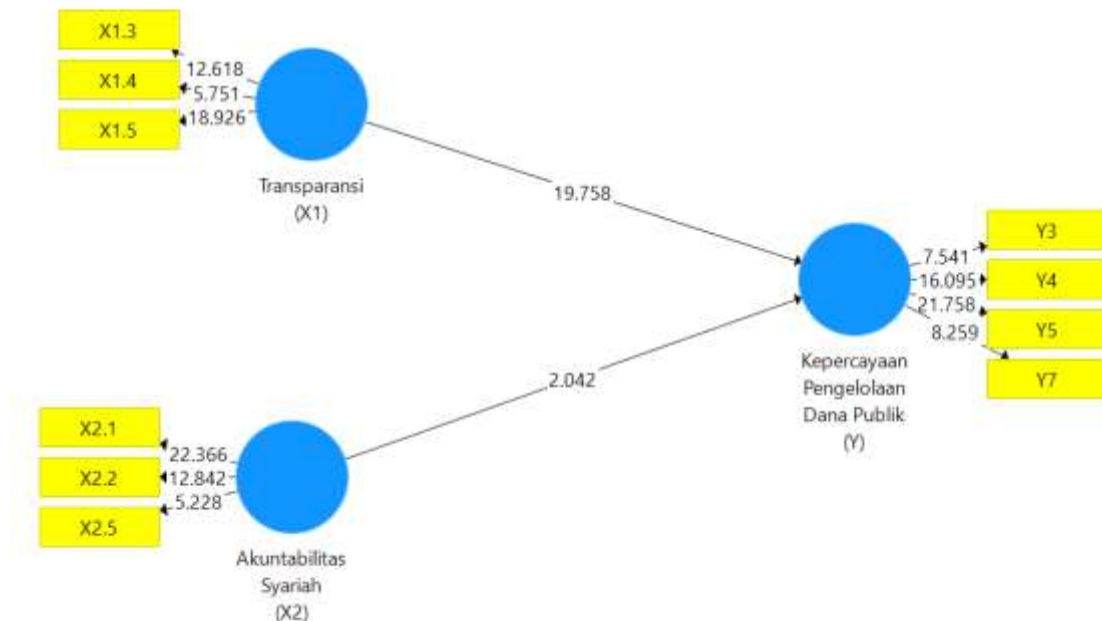
Tabel.4. Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Akuntabilitas Syariah_(X2) -> Kepercayaan Pengelolaan Dana Publik_(Y)	0,141	0,130	0,069	2,042	0,042
Transparansi_(X1) -> Kepercayaan Pengelolaan Dana Publik_(Y)	0,853	0,860	0,043	19,758	0,000

Hasil pengujian menunjukkan bahwa **Transparansi (X1)** memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap **Kepercayaan Masyarakat (Y)**, dengan nilai *path coefficient* sebesar **0,853**, *t-statistics* 19,758, dan *p-value* 0,000. Nilai ini jauh melebihi batas signifikansi ($t > 1,96$; $p < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan pemerintah daerah, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

Selanjutnya, pengaruh **Akuntabilitas Syariah (X2)** terhadap **Kepercayaan Masyarakat (Y)** juga menunjukkan hasil positif dan signifikan, dengan nilai *path coefficient* sebesar **0,141**, *t-statistics* 2,042, dan *p-value* 0,042. Meskipun nilai koefisiennya lebih kecil dibandingkan transparansi, hasil ini tetap menunjukkan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban berbasis syariah berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat.

Kedua hasil ini saling menguatkan: transparansi berperan besar dalam memberikan akses informasi dan membuka ruang kontrol publik, sedangkan akuntabilitas syariah memberikan landasan moral dan spiritual dalam pengelolaan dana. Keduanya berinteraksi secara harmonis membentuk kepercayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap pemerintah daerah.



Gambar.2. Inner Model

Gambar 2 berikut menampilkan *inner model* hasil pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS. Model ini menggambarkan hubungan struktural antara variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas Syariah (X2), dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Publik (Y). Panah penghubung antarvariabel menunjukkan arah pengaruh yang diuji dalam penelitian, sedangkan angka di setiap jalur menunjukkan nilai koefisien pengaruh (path coefficient) dan tingkat signifikansi berdasarkan hasil pengujian *bootstrapping*.

Berdasarkan *inner model* yang dihasilkan, nilai koefisien pengaruh Transparansi (X1) terhadap Kepercayaan Masyarakat (Y) adalah 0,853 dengan nilai *t-statistics* sebesar 19,758. Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi publik dan kejelasan laporan keuangan, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, jalur pengaruh Akuntabilitas Syariah (X2) terhadap Kepercayaan Masyarakat (Y) memiliki nilai koefisien 0,141 dengan nilai *t-statistics* 2,042 dan *p-value* 0,042. Hasil ini juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, meskipun

dengan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan transparansi. Artinya, prinsip pertanggungjawaban moral dan spiritual berdasarkan nilai-nilai Islam juga memberikan dampak terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat, meskipun efeknya lebih moderat.

Secara visual, *inner model* menggambarkan bahwa jalur dari Transparansi (X1) menuju Kepercayaan Masyarakat (Y) memiliki garis pengaruh yang lebih tebal dibandingkan jalur Akuntabilitas Syariah (X2) ke Y, menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh dominan dalam model penelitian ini.

Hasil ini memperkuat temuan numerik pada uji *path coefficient*, di mana transparansi memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan kepercayaan publik, sedangkan akuntabilitas syariah memperkuat legitimasi moral pengelolaan dana publik. Dengan demikian, *inner model* ini tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi visual, tetapi juga sebagai representasi empiris dari hubungan antarvariabel yang diuji, sekaligus menjadi dasar dalam menarik kesimpulan penelitian.

Pembahasan

Secara keseluruhan, model penelitian menunjukkan bahwa **transparansi** memiliki pengaruh dominan terhadap **kepercayaan masyarakat**, sedangkan **akuntabilitas syariah** memberikan pengaruh tambahan melalui dimensi moralitas dan spiritualitas. Kombinasi keduanya memperkuat persepsi publik bahwa pengelolaan dana publik di Pemerintah Daerah Palembang tidak hanya terbuka dan profesional, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam.

Hasil ini juga menjelaskan hubungan antarhasil yang sebelumnya diperoleh. Validitas indikator yang tinggi membuktikan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu menangkap esensi transparansi dan akuntabilitas syariah. Tidak adanya multikolinearitas menunjukkan bahwa kedua variabel bekerja secara sinergis namun tetap independen. Konsistensi reliabilitas yang kuat memperkuat bahwa data yang diperoleh stabil dan dapat dipercaya. Akhirnya, analisis *path coefficient* menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel yang terukur secara statistik juga memiliki relevansi praktis dan teoritis dalam konteks pemerintahan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik di Pemerintah Daerah Palembang sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah mampu menjaga transparansi dalam penyampaian

informasi keuangan dan menginternalisasi nilai-nilai akuntabilitas syariah dalam setiap proses pengelolaan dana publik. Transparansi memberikan legitimasi rasional kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas syariah memperkuat legitimasi moral dan spiritual. Sinergi keduanya menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Smart PLS, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik di Pemerintah Daerah Palembang.

Variabel transparansi memiliki pengaruh paling dominan, yang berarti keterbukaan informasi, kejelasan laporan keuangan, dan akses publik terhadap data pemerintah merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas syariah juga memberikan pengaruh positif meskipun lebih kecil, menunjukkan bahwa tanggung jawab moral, etika, dan spiritual berbasis nilai-nilai Islam turut memperkuat legitimasi pemerintah dalam pengelolaan dana publik. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi transparansi dan akuntabilitas syariah menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola dana publik yang dipercaya masyarakat dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2020). Optimal route recommendation for waste carrier vehicles for efficient waste collection: A step forward towards sustainable cities. *IEEE Access*, 8, 77875–77887. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988173>
- Ali, A. (2024). A Resource-Aware Multi-Graph Neural Network for Urban Traffic Flow Prediction in Multi-Access Edge Computing Systems. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 70(4), 7252–7265. <https://doi.org/10.1109/TCE.2024.3439719>
- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzaki membayar zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan ...*. scholar.archive.org. Retrieved from [https://scholar.archive.org/work/lcptv6l2xvcyv4caxadfmicka/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/12702/Nahdliatul Amalia](https://scholar.archive.org/work/lcptv6l2xvcyv4caxadfmicka/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/12702/Nahdliatul%20Amalia)
- Banerjee, A. (2020). E-governance, Accountability, and Leakage in Public Programs: Experimental Evidence from a Financial Management Reform in India†. *American Economic Journal Applied Economics*, 12(4), 39–72. <https://doi.org/10.1257/app.20180302>

- Furqan Uki, R. P. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Minat Transaksi di Bank Islam (Studi Kasus di Bandar Park Land, Slangor, Malaysia)*. 4, 1349–1358.
- Garber, K. (2020). Estimating access to health care in Yemen, a complex humanitarian emergency setting: a descriptive applied geospatial analysis. *Lancet Global Health*, 8(11). [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30359-4](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30359-4)
- Greer, R. A. (2020). A review of public water infrastructure financing in the United States. *Wiley Interdisciplinary Reviews Water*, Vol. 7. <https://doi.org/10.1002/wat2.1472>
- Hlel, K. (2020). IFRS adoption, corporate governance and management earnings forecasts. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(2), 325–342. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2019-0007>
- Islam, J. E. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 90–101. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i1.254>
- Ismail, A., & Pradesyah, R. (2020). SHARIA MENTAL ACCOUNTING IN THE DEVELOPMENT OF HALAL MSMEs FOR GENERATION Z IN MEDAN CITY Abdul. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 6(July), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijse.v6i3.3952>
- Jas, W. S., Maarif, M. S., Syaikat, Y., & Beik, I. S. (2023). Implementasi Model Manajemen Perubahan Strategis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 9(1), 163–175. <https://doi.org/10.17358/jabm.9.1.163>
- Kurniawan, P. A. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon ...*. repositori.unimma.ac.id. Retrieved from <https://repositori.unimma.ac.id/686/>
- Liu, J. (2022). A Hybrid Blockchain Model for Trusted Data of Supply Chain Finance. *Wireless Personal Communications*, 127(2), 919–943. <https://doi.org/10.1007/s11277-021-08451-x>
- Lu, Y. (2021). An NGO disaster relief network for small and medium-scale natural hazards in China. *Natural Hazards*, 106(3), 2689–2709. <https://doi.org/10.1007/s11069-021-04560-9>
- Mavrotas, G. (2021). Combining multiple criteria analysis, mathematical programming and Monte Carlo simulation to tackle uncertainty in Research and Development project portfolio selection: A case study from Greece. *European Journal of Operational Research*, 291(2), 794–806. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.09.051>
- Michaelowa, A. (2020). Catalysing private and public action for climate change mitigation: the World Bank's role in international carbon markets. *Climate Policy*, 120–132. <https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1790334>
- Parker, L. (2023). The commercialized Australian public university: An accountingized transition. *Financial Accountability and Management*, Vol. 39, pp. 125–150. <https://doi.org/10.1111/faam.12310>
- Pradesyah, R., Yuslem, N., & Batubara, C. (2021). *Fraud in Financial Institutions*. 4(2), 341–348. Retrieved from <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i2.1257>
- Rafew, S. M. (2021). Application of system dynamics model for municipal solid waste management in Khulna city of Bangladesh. *Waste Management*, 129, 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.04.059>
- Tort-Donada, J. (2020). Bridging the gap between city and water: A review of urban-

- river regeneration projects in France and Spain. *Science of the Total Environment*, 700. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134460>
- Upadhyay, U. D. (2022). Trends In Self-Pay Charges And Insurance Acceptance For Abortion In The United States, 2017–20. *Health Affairs*, 41(4), 507–515. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2021.01528>
- Wu, Y. (2020). A risk assessment framework of seawater pumped hydro storage project in China under three typical public-private partnership management modes. *Journal of Energy Storage*, 32. <https://doi.org/10.1016/j.est.2020.101753>
- Zhou, S. (2020). Big Data-Driven Abnormal Behavior Detection in Healthcare Based on Association Rules. *IEEE Access*, 8, 129002–129011. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3009006>